

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pelayanan Pendaftaran Pajak Mutasi Keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK : 970/0537

Persyaratan

1. Isi formulir SPOPD
2. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha Surat Kuasa)
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Kwitansi Pembelian
6. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWOKLLJ (SPKB Valid Tahun Terakhir)
7. Bukti Hasil Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran Pembayaran Pajak Mutasi Keluar (Dalam dan Luar Provinsi)
2. Memverifikasi Persyaratan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar
3. Menetapkan Besaran PKB dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBPN Mutasi Keluar
6. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
7. Pemilik Kendaraan Bermotor Menerima Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
8. Mengarsip SKKP dan Arsip Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

50 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Pembayaran Pajak Mutasi Keluar (Dalam dan Keluar Provinsi) (5 menit)
2. Memverifikasi Persyaratan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar (5 menit)
3. Menetapkan Besaran PKB dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP (10 menit)
4. Memverifikasi SKKP (7 menit)
5. Menerima Pembayaran SKKP dan PNPB Mutasi Keluar (5 menit)
6. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (8 menit)
7. Pemilik Kendaraan Bermotor Menerima Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (5 menit)
8. Mengarsip SKKP dan Arsip Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)